



Khairani Matondang¹
Febriana Krisdayanti
Barus²
Khairiah³
Dilli Salsa Fira⁴
Dwi Susanti⁵

STUDI LITERATUR : PERAN EKONOMI PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara ketiga pilar ini untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Ekonomi public sebagai bagian integral dari kebijakan pemerintah, memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan ini, ekonomi publik perlu mendukung kebijakan ekonomi hijau, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis peran ekonomi publik dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan fiskal dan keberlanjutan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa upaya positif, tantangan besar seperti ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan masih menjadi hambatan yang harus diatasi dengan kebijakan yang lebih holistik dan terkoordinasi.

Kata Kunci: Ekonomi, Publik, Pembangunan, Berkelanjutan

Abstract

Sustainable development is a concept of development that not only focuses on economic growth but also encompasses social and environmental aspects. Its main goal is to achieve a balance between these three pillars to create equitable and sustainable welfare. Public economics, as an integral part of government policies, plays an important role in supporting the achievement of sustainable development. In addressing these challenges, public economics must support green economy policies, sustainable natural resource management, and environmentally friendly infrastructure development. This study uses a literature review method to analyze the role of public economics in sustainable development in Indonesia, with a focus on fiscal policies and environmental sustainability. The findings of the study indicate that, although there have been some positive efforts, significant challenges such as social inequality and environmental damage remain obstacles that must be addressed through more holistic and coordinated policies.

Keywords: Economics, Public, Development, Sustainable

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan tidak hanya berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan yang harus diperhatikan secara bersamaan. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah untuk mencapai keseimbangan antara tiga pilar penting: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek ini harus berkembang seimbang dan saling mendukung untuk menciptakan hasil yang adil dan

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan
email: alawiyah@unimed.ac.id, fbrianakrsbarus@gmail.com, khairiah225@gmail.com
dillisalsafra@gmail.com dwi811315@gmail.com

berkelanjutan. Negara dengan sumber daya alam yang melimpah sering menghadapi tantangan besar, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan yang serius (Suparmoko, 2020). Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor dan kebijakan yang komprehensif, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, pengelolaan lingkungan yang baik, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana (Utami, et al, 2023).

Ekonomi publik sebagai bagian integral dari kebijakan pemerintah, memegang peran sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Kebijakan fiskal yang dikelola oleh pemerintah dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Penerapan kebijakan yang tepat di sektor ini akan sangat menentukan jalannya pembangunan, baik dalam hal penyediaan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun pengelolaan sumber daya alam (Yunus, 2021).

Namun, meskipun ekonomi publik memiliki potensi yang besar, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Beberapa wilayah, terutama daerah-daerah terpencil dan pedesaan, masih tertinggal dalam hal akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang memadai. Sementara itu, kawasan perkotaan seringkali mengalami masalah overpopulasi, kemacetan, dan polusi yang membahayakan kualitas hidup warganya. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sering kali berada dalam dilema antara eksploitasi yang cepat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Ketergantungan negara terhadap sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan besar seringkali menimbulkan kerusakan ekosistem yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang bergantung langsung pada sumber daya alam (Ferlita, et al, 2024).

Dengan melihat permasalahan ini, penting untuk memahami bahwa peran ekonomi publik dalam pembangunan berkelanjutan bukan hanya terbatas pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi semata. Sebaliknya, ekonomi publik harus dapat memastikan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata, mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan sosial dan lingkungan. Peran ekonomi publik menjadi lebih penting karena tantangan besar yang dihadapi negara ini, baik dari segi ketimpangan sosial, masalah pengelolaan lingkungan, hingga ketergantungan pada sektor ekstraktif yang kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi publik harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan yang lebih luas, termasuk ekonomi hijau, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup (Safira, et al, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber referensi yang relevan mengenai peran ekonomi publik dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan penulis untuk menggali pemahaman mendalam mengenai topik ini melalui analisis dari berbagai literatur yang telah ada, baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga internasional. Proses pencarian referensi dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan PubMed, serta dokumen kebijakan yang tersedia di situs web resmi pemerintah dan organisasi terkait. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Literatur yang dipilih akan disaring berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya, serta fokus pada kontribusinya terhadap pemahaman tentang peran ekonomi publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Ramdhani, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merujuk pada upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ide ini pertama kali diungkapkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED) melalui laporan Brundtland pada 1987, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan, agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk kepentingan jangka panjang. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu meraih kualitas hidup yang lebih baik, sambil menjaga kelestarian planet ini (Fauzi, 2014).

Pembangunan berkelanjutan melibatkan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konteks ini, prinsip keberlanjutan diterapkan dalam berbagai sektor, seperti energi, pertanian, industri, serta tata kelola sumber daya alam. Untuk mencapainya, diperlukan pendekatan yang inklusif dan holistik, yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat. Pembangunan berkelanjutan juga mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti efisiensi sumber daya, pengelolaan sampah, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan terhadap ekosistem. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama dari seluruh elemen masyarakat global.

Permasalahan Global dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menghadapi berbagai permasalahan yang saling terkait, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah perubahan iklim, yang semakin memperburuk kondisi lingkungan global. Fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, berdampak langsung pada cuaca ekstrem, seperti badai, banjir, dan kekeringan yang sering terjadi di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim ini juga mengancam ketahanan pangan, ketersediaan air, serta keberagaman hayati, yang pada akhirnya dapat menghambat capaian pembangunan berkelanjutan. Dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh negara-negara berkembang yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam, sementara negara maju yang lebih banyak berkontribusi pada emisi karbon masih kesulitan untuk bertransisi ke energi bersih (Ferlita, et al, 2024).

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah krisis sumber daya alam, di mana eksploitasi berlebihan terhadap alam, seperti penebangan hutan, pertambangan yang merusak lingkungan, dan penggunaan energi fosil, mengancam keberlanjutan ekosistem. Sumber daya alam yang terbatas dan semakin menipis membutuhkan solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Misalnya, sektor energi yang masih sangat bergantung pada batu bara dan minyak bumi membutuhkan transisi cepat menuju energi terbarukan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Namun, transisi ini juga menghadapi hambatan besar, seperti biaya investasi yang tinggi dan ketergantungan yang kuat pada sektor energi fosil yang sudah mapan.

Selain itu, ketimpangan sosial dan kemiskinan menjadi tantangan besar lainnya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Meskipun pertumbuhan ekonomi di beberapa negara telah menunjukkan hasil yang signifikan, ketimpangan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih masih sangat tinggi, terutama di negara-negara berkembang. Ketimpangan ini memperburuk masalah sosial dan menciptakan lapisan masyarakat yang terpinggirkan, yang akhirnya menghambat pencapaian keadilan sosial yang menjadi bagian integral dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang masih meluas menyebabkan ketidakmampuan bagi sebagian besar populasi untuk mengakses teknologi yang ramah lingkungan atau berinvestasi dalam gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

Keempat isu ini saling terkait dan saling memperburuk satu sama lain. Ketidakadilan sosial dan kemiskinan sering kali memaksa masyarakat untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan, sementara dampak dari perubahan iklim dan krisis sumber daya alam semakin memperburuk kondisi kehidupan mereka. Oleh karena itu, pencapaian pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan

ini secara bersamaan. Menghadapi tantangan-tantangan tersebut memerlukan kebijakan global yang lebih terkoordinasi, kemitraan antara sektor publik dan swasta, serta partisipasi aktif dari masyarakat global untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Peran Ekonomi Publik dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Ekonomi publik di Indonesia memiliki peran kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah kebijakan fiskal, yang mencakup pengelolaan anggaran negara untuk berbagai sektor yang mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Meiyenti, et al, 2023). Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, anggaran negara tahun 2024 diprioritaskan untuk program-program pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi digital. Sebagai contoh, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp 422,7 triliun, yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal (Utami, et al, 2024).

Indonesia juga mulai fokus pada kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Salah satu contoh kebijakan yang mendukung ekonomi hijau adalah kebijakan "Green Economy" yang diperkenalkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Di bawah kebijakan ini, pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan (Anwar, 2022). Pada 2023, Indonesia berhasil menambah kapasitas energi terbarukan sebanyak 3.322 MW, yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air, angin, dan matahari. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi publik Indonesia sudah mulai mengarah pada model pembangunan yang lebih ramah lingkungan, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Salah satu fungsi utama ekonomi publik adalah mendukung pemerataan kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa program yang cukup efektif dalam menurunkan angka kemiskinan antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 menurun menjadi 9,36%, turun sebesar 0,18% dibandingkan 9,54% pada tahun sebelumnya, yaitu 2022. Meski penurunan ini tergolong kecil, capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi publik telah memberikan kontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Namun, masih terdapat tantangan signifikan, terutama dalam mengatasi ketimpangan distribusi antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

Tantangan dalam Implementasi Ekonomi Publik untuk Pembangunan Berkelanjutan

Meskipun berbagai kebijakan ekonomi publik telah menunjukkan hasil positif, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih sangat mencolok. Berdasarkan data dari BPS, sekitar 40% penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan masih memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Sementara itu, sebagian besar anggaran pembangunan masih terfokus pada wilayah perkotaan, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Ketimpangan ini memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat tercapainya pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Indonesia menghadapi dilema besar dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit, negara ini masih sangat bergantung pada sektor-sektor ekstraktif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sektor energi dan pertambangan menyumbang sekitar 10% dari PDB Indonesia pada tahun 2022, sementara sektor pertanian dan kehutanan menyumbang 13,28%. Ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi dan polusi, yang dapat mengancam keberlanjutan jangka panjang. Misalnya, pada tahun 2023, Indonesia kehilangan lebih dari 1 juta hektar hutan tropis, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan tingkat deforestasi tercepat di dunia. Hal ini tentunya berisiko terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal pelestarian lingkungan.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketidakmerataan dalam distribusi anggaran yang mengarah pada ketimpangan ekonomi. Meskipun ada berbagai program bantuan sosial yang telah dijalankan, efektivitasnya masih terbatas. Data menunjukkan bahwa meskipun anggaran untuk program PKH terus meningkat, jumlah rumah tangga yang masih berada di bawah garis kemiskinan tetap signifikan. Pada tahun 2023, jumlah rumah tangga miskin di Indonesia masih mencapai 25,9 juta. Salah satu penyebab ketidakmerataan ini adalah kendala birokrasi dan administrasi yang memperlambat penyaluran bantuan. Selain itu, pengelolaan dana yang tidak efisien dan kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program sosial juga menjadi faktor yang memperburuk masalah ketimpangan ekonomi.

Kebijakan fiskal yang berfokus pada pembangunan infrastruktur juga memiliki keterbatasan dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial. Meskipun pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dampaknya terhadap kesejahteraan sosial akan terbatas. Dalam konteks ini, pendidikan dan kesehatan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan dalam kebijakan ekonomi publik. Sebagai contoh, meskipun Indonesia telah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, yaitu sekitar 20% dari APBN, kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Menurut data dari UNESCO, Indonesia menduduki peringkat ke-67 dari total 209 negara dalam hal kualitas pendidikan dasar, yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur fisik dan pengembangan sumber daya manusia.

Kendala dalam Pengembangan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Indonesia mulai mengembangkan sektor energi terbarukan, pengembangan ini masih terhambat oleh kurangnya investasi di sektor ini. Data dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, kontribusi sektor ini terhadap total kapasitas energi Indonesia pada 2023 baru mencapai 14%, jauh di bawah target pemerintah yang ditetapkan dalam Nationally Determined Contributions (NDC) pada pertemuan COP26, yaitu 23% pada tahun 2025. Salah satu hambatan utama adalah biaya investasi yang tinggi dan infrastruktur yang terbatas untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di wilayah-wilayah terpencil.

SIMPULAN

Ekonomi publik memegang peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, ekonomi publik dapat mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan sosial, serta mengelola sumber daya alam dengan lebih bijaksana. Kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur yang merata menjadi langkah-langkah penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun sudah ada upaya-upaya positif, tantangan besar seperti ketimpangan antar wilayah, ketergantungan pada sektor ekstraktif, dan hambatan dalam penerapan ekonomi hijau masih harus dihadapi secara serius. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih holistik dan koordinasi yang baik antar sektor untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian sosial dan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343-356.
- Badan Pusat Statistik (BPS).
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 42-52.
- Ferlita, S., Saepudin, E. A., Maharani, P. S., Kurniawan, I. P., Susilawati, S., & Al Fauzan, R. Z. (2024). Analisis Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 189-195.

- Kusuma, N. R., Hamidah, I., & Fitriani, N. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Konferensi Nasional Studi Islam (KONASI), 1, 142-153.
- Meiyenti, I., Agustina, I., Primadhang, E. F., Tumija, T., & Nalien, E. M. (2023). Menganalisis Kebijakan Fiskal dan Moneter: Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science, 1(03), 186-195.
- Ramdhani, M. (2021). Metode penelitian. Yogyakarta : Cipta Media Nusantara.
- Safira, T., Mauridhoh, M. M., & Yasin, M. (2024). Analisis Potret Ekonomi Publik Indonesia Meliputi Tanaman Palawija, Perkebunan, Kehutanan, Perternakan Dan Perikanan. Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan, 2(3), 01-11.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 9(1), 39-50.
- Utami, M., Aqila, C., Andini, P., & Nasution, Y. S. J. (2024). Analisis Pertumbuhan Konsumsi Produk Halal di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025. J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 3(02).
- Utami, N., Saragih, R. F., Daulay, M., Maulana, M. D., & Ramadani, P. (2023). Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi Indonesia. Journal of Management and Social Sciences, 2(1), 46-59.
- Yunus, R., & Anwar, A. I. (2021). Ekonomi Publik. Bojong : Penerbit NEM.